

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG SOLUSI BERBASIS ALAM DI UNFCCC COP29

Konferensi Para Pihak ke-29 UNFCCC (COP 29)

Sesi Ke-19 Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto (CMP 19)

Sesi Ke-6 Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai pertemuan Para Pihak Perjanjian Paris (CMA 6)

Sidang Ke-61 Badan Pendukung Pelaksanaan (SBI 61)

Sidang Ke-61 Badan Pendukung Nasihat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA 61)

11 – 22 November 2024, Baku, Azerbaijan

Pada COP 29 UNFCCC, negara-negara harus menemukan kesepakatan untuk mempercepat aksi iklim guna membatasi pemanasan global hingga 1,5° Celsius, yang memerlukan upaya transformasional mendesak yang memanfaatkan potensi penuh solusi berbasis alam¹ untuk mengurangi, beradaptasi, dan menanggulangi perubahan iklim. Pada konferensi pertengahan tahun (SB 60), negara-negara mengajukan diskusi teknis penting, antara lain, terkait pengembangan indikator Kerangka Kerja UEA untuk Ketahanan Iklim Global, kelanjutan Kelompok Kerja Fasilitatif untuk Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat, serta aksi iklim laut. Namun, mereka kesulitan menemukan titik temu mengenai tujuan kolektif baru terukur tentang pendanaan iklim atau membuat kemajuan substansial pada semua aturan yang tersisa untuk kerja sama internasional melalui mekanisme pasar dan non-pasar berdasarkan Pasal 6.

Negara-negara harus datang ke COP 29 siap membangun kemauan politik dan menemukan ruang kompromi untuk memajukan area kerja yang sedang berlangsung dan area baru yang disetujui dalam Konsensus UEA di COP 28. Beberapa agenda penting untuk mempercepat solusi berbasis alam, tetapi negosiasi mengenai tujuan keuangan iklim dan Pasal 6 merupakan kunci utama memastikan negara-negara dapat mengimplementasikan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional 2025 yang akan datang dan mendanai transformasi yang dibutuhkan di semua sektor pada 2030. Negara-negara harus memastikan diskusi mereka di Baku didasari kebutuhan memobilisasi triliunan dalam pendanaan iklim, mengubah praktik bisnis seperti biasa, menghentikan bahan bakar fosil, dan mengalihkan insentif menuju ekonomi yang positif terhadap alam yang memberikan hasil berarti bagi alam, keanekaragaman hayati, manusia, dan iklim.

Dalam ringkasan ini, Conservation International mengusulkan rekomendasi kebijakan terperinci untuk memajukan isu-isu kritis terkait solusi berbasis alam dan aksi iklim inklusif berbasis hak dalam lima topik utama di COP 29.

- Mekanisme kerja sama berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris
- Sasaran Kuantifikasi Kolektif Baru tentang Pendanaan Iklim
- Program kerja UEA-Belem mengenai indikator Kerangka Kerja UEA untuk Ketahanan Iklim Global
- Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat
- Hubungan Laut dan Iklim

¹Per [Resolusi UNEP/EA.5/Res. 5](#) Solusi berbasis alam didefinisikan sebagai “tindakan melindungi, melestarikan, memulihkan, menggunakan dan mengelola secara berkelanjutan ekosistem darat, air tawar, pesisir, dan laut alami atau yang dimodifikasi yang mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara efektif dan adaptif, sementara secara bersamaan memberikan kesejahteraan manusia, layanan ekosistem, ketahanan, dan manfaat keanekaragaman hayati.”

Ringkasan Rekomendasi

Meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan iklim dan pendanaan melalui mekanisme kerja sama.

- Berfokus pada isu-isu utama yang belum terselesaikan untuk operasionalisasi Pasal 6 dan memastikan program kerja mengenai penghindaran emisi (berdasarkan Pasal 6.2 dan 6.4) dan peningkatan konservasi (berdasarkan Pasal 6.4) mempertahankan cakupan sempit sesuai mandatnya dan tidak melemahkan peran solusi berbasis alam.
- Untuk memberi insentif bagi aksi mitigasi ambisius, semua pendekatan berdasarkan Pasal 6 harus mempercepat solusi berbasis alam dengan integritas lingkungan dan sosial yang ketat serta melibatkan negara dan pemangku kepentingan secara luas. Untuk tujuan ini, Para Pihak harus mendorong pengurangan dan penghapusan emisi berbasis alam dan menghindari penerapan persyaratan apa pun yang dapat secara tidak tepat menghambat penggunaannya berdasarkan mekanisme Pasal 6.4.
- Melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam diskusi tentang hubungan operasionalisasi Pasal 6 dan Platform Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat.

Memastikan Tujuan Kolektif Terukur Baru tentang keuangan iklim (NCQG) menetapkan tujuan ambisius yang mempertimbangkan kebutuhan keuangan untuk solusi berbasis alam.

- Mengadopsi pendekatan berlapis yang terdiri dari target kuantitatif untuk mobilisasi dan penyediaan pendanaan iklim dan penghapusan subsidi yang merugikan, dan elemen kualitatif untuk mobilisasi sumber daya domestik, memanfaatkan pendanaan swasta, dan mempromosikan penggunaan pendanaan campuran dan instrumen inovatif. Mencari keselarasan dengan Kerangka Keanekaragaman Hayati Global (GBF) Kunming–Montreal, sambil merampingkan proses implementasi dan pelaporan untuk memastikan tidak ada penghitungan ganda.
- Mempertimbangkan untuk menetapkan sub-tujuan indikatif yang terkait dengan setiap sektor dan/atau jalur mitigasi. Misalnya, negara-negara harus bertujuan mengalokasikan 30% dari keuangan mereka untuk solusi berbasis alam, karena mereka harus berkontribusi sebesar 30% dari tindakan mitigasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan 1,5°C.
- Mengembangkan tujuan kualitatif sebagai indikator keberhasilan penyampaian NCQG, seperti standar kualitas tinggi, peningkatan akses langsung, penyampaian berimbang, efektivitas biaya, maksimalisasi manfaat sosial dan ekologi, pengurangan tekanan utang, dan mengatasi kesenjangan pengetahuan dan kapasitas.

Mengintegrasikan alam dan masyarakat yang rentan terhadap iklim ke dalam metrik dan indikator untuk Kerangka Kerja Global UEA tentang Ketahanan Iklim.

- Menggabungkan solusi berbasis alam dan kerentanan ekosistem terhadap perubahan iklim dalam target tematik dan dimensional sebagai tema lintas sektor, yang mengakui alam sebagai solusi adaptasi penting dan aset yang terpengaruh oleh dampak iklim.
- Memprioritaskan indikator yang memiliki sinergi dengan Konvensi Rio PBB dan kerangka kerja internasional lainnya, terutama indikator dari GBF untuk target ekosistem dan keanekaragaman hayati (9d). Menyesuaikan indikator yang diperlukan agar spesifik terhadap adaptasi dan mencakup informasi yang relevan untuk Kerangka Kerja UEA.
- Memasukkan indikator keuangan dan indikator yang memungkinkan pelaksanaan untuk mengukur pencapaian target tematik dan dimensional, dan memastikan indikator mengakui pentingnya dan prinsip adaptasi berbasis masyarakat.
- Memastikan indikator dapat dipisahkan berdasarkan gender dan ekosistem, dan jika memungkinkan, variabel lain dan kelompok rentan yang berbeda seperti usia, kemampuan/disabilitas, masyarakat adat dan masyarakat lokal, dll.

Ringkasan Rekomendasi (lanjutan)

Memperkuat fungsi Platform Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat (LCIPP) untuk memastikan partisipasi yang inklusif dan efektif dalam proses kebijakan iklim dan pembagian manfaat.

- Mengadopsi rancangan keputusan COP tentang LCIPP untuk melanjutkan mandat Kelompok Kerja Fasilitatif (FWG) dan mengadopsi rencana kerja LCIPP 2025-2027.
- Menggabungkan rekomendasi dari [laporan hasil FWG](#) dalam pelaksanaan rencana kerja LCIPP 2025–2027, dengan mempertimbangkan kemajuan terkait representasi masyarakat lokal dan mempertimbangkan cara-cara keterlibatan lebih lanjut.
- Menyebarkan hasil dan pelajaran yang dipetik dari pertukaran regional LCIPP dan menggunakannya untuk menginformasikan agenda utama UNFCCC serta memperkuat hubungan lintas konvensi PBB.
- Menerapkan model kolaboratif FWG berdampingan LCIPP antara Para Pihak dan masyarakat Adat untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang-bidang yang partisipasi pemangku kepentingan non-Pihak sangat penting untuk meningkatkan ambisi iklim dan memenuhi tujuan Perjanjian Paris.

Terus membangun dan meningkatkan tindakan mendesak pada hubungan laut–iklim.

- Meningkatkan dan memobilisasi aliran keuangan untuk solusi berbasis alam pesisir dalam negosiasi dan proses terkait keuangan iklim, termasuk NCQG.
- Memasukkan indikator untuk solusi berbasis alam pesisir dalam indikator Kerangka Kerja UEA tentang Ketahanan Iklim Global.
- Membangun kapasitas dan pemahaman tentang cara-cara pengelolaan solusi berbasis alam pesisir, termasuk konservasi dan pemulihan habitat karbon biru, dapat dimasukkan dalam rencana aksi baru dan yang diperbarui. Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional dan Rencana Adaptasi Nasional, selaras dengan target lahan basah pesisir yang termasuk dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional.

Mekanisme Kerja Sama berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris

Agenda CMA poin 15

Agenda SBSTA poin 13

Tautan Dokumen PBB yang Relevan: [Laporan tahunan Badan Pendukung Pasal 6.4](#); [SBSTA 60 Pasal 6.2 Kesimpulan](#); [SBSTA 60 Pasal 6.4 Kesimpulan](#); [SBSTA 60 Pasal 6.8 Kesimpulan](#)

Pasal 6 Perjanjian Paris menetapkan kerangka kerja luas untuk kerja sama sukarela di antara Para Pihak dalam melaksanakan aksi iklim. Pasal tersebut menetapkan tiga mekanisme yang dapat digunakan Para Pihak untuk berinteraksi: 1) pendekatan kerja sama bilateral atau regional melalui hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional (ITMO); 2) mekanisme UNFCCC yang diatur secara terpusat untuk berkontribusi pada mitigasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan; dan 3) pendekatan nonpasar.² Mendorong transfer pengurangan emisi dan kredit penghapusan berkualitas tinggi yang dihasilkan di semua sektor, termasuk sektor lahan, dapat mendorong aliran dana yang dibutuhkan untuk aksi iklim, menangani sumber dan penyerap emisi secara efektif, dan menghasilkan peluang untuk ambisi lebih besar secara keseluruhan. Selain itu, pendanaan pengurangan dan penyerapan karbon berbasis alam sangat penting untuk tindakan mitigasi iklim jangka pendek yang diperlukan untuk membatasi pemanasan hingga 1,5°C, dan solusi berbasis alam (NbS) memberikan manfaat tambahan mitigasi dengan mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan air, dan menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Jenis pengurangan dan/atau

² Masing-masing Perjanjian Paris, Pasal 6, Paragraf 2, 4, dan 8.

penyerapan emisi ini juga telah diuji dan dipantau secara luas dan dapat memberikan manfaat permanen untuk mitigasi iklim.

Sejak aturan utama Pasal 6 diputuskan pada COP 26, Para Pihak telah berupaya mendefinisikan rincian yang belum terselesaikan untuk penerapan setiap pendekatan kerja sama. Para pihak secara khusus meminta Badan Pengawas Pasal 6.4 (A6.4 SB) untuk menyiapkan rekomendasi mengenai kegiatan yang melibatkan pemindahan, dan panduan mengenai metodologi. Setelah memajukan pekerjaan ini selama beberapa tahun terakhir, pada COP 28 A6.4 SB ditugaskan untuk melakukan pekerjaan lebih lanjut guna menyempurnakannya, dengan target mengajukannya kepada CMA untuk disetujui pada COP 29. Ketika pekerjaan teknis ini selesai, Para Pihak harus memastikan solusi berbasis alam (NbS) diprioritaskan di bawah pendekatan pasar dan non-pasar untuk mengamankan aliran keuangan menuju solusi iklim penting ini; untuk tujuan ini, Conservation International merekomendasikan:

- **Panduan Pasal 6 tetap terbuka terhadap alam.** Meski Para Pihak telah sepakat bahwa kredit dari semua sektor (termasuk alam) memenuhi syarat berdasarkan semua mekanisme Pasal 6, para negosiator baru-baru ini membahas dua alternatif khusus untuk pengurangan dan penghapusan karbon berbasis alam berdasarkan Pasal 6.4. Opsi pertama yang sedang dibahas adalah sepenuhnya mengecualikan REDD+ dari Pasal 6.4, yang akan bertentangan dengan keputusan yang menetapkan aturan untuk mekanisme ini di Glasgow; lebih jauh lagi, opsi ini gagal mengakui peran mendasar yang harus dimainkan alam dalam memenuhi tujuan suhu Perjanjian Paris dan kesenjangan pendanaan alam yang signifikan. Opsi kedua yang sedang dibahas adalah agar Pasal 6.4 hanya mengizinkan kegiatan REDD+ dari negara-negara yang memenuhi semua persyaratan berdasarkan Kerangka Warsawa untuk REDD+ (misalnya, Strategi Nasional REDD+, Tingkat Referensi Hutan, Pengamanan REDD+, dan Sistem Pemantauan Hutan Nasional). Pilihan ini harus didukung karena akan memungkinkan transparansi, keselarasan, dan integritas lingkungan yang lebih baik sekaligus memastikan aliran dana ke alam. **Para Pihak hendaknya hanya mengadopsi rekomendasi mengenai penanggulangan dan pedoman metodologi yang bersifat netral terhadap sektor tersebut dan menghindari penerapan persyaratan apa pun yang dapat secara tidak wajar atau tidak proporsional menghambat pemanfaatan pengurangan dan/atau penanggulangan berbasis alam berdasarkan mekanisme Pasal 6.4, sebagai berikut:**
 - **Risiko pembalikan:** Segala perangkat atau panduan yang disetujui untuk penilaian risiko pembalikan untuk pengurangan dan penghapusan Pasal 6.4 harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mendiskriminasi penghapusan berbasis alam secara tidak adil atau memberi beban yang tidak semestinya pada kredit dari penghapusan berbasis alam. Semua kegiatan mengandung risiko pembalikan, dan tidak boleh ada upaya mengkategorikan kegiatan dengan tingkat risiko pembalikan tertentu. Desain perangkat penilaian risiko harus mempertimbangkan hal ini dan tidak digunakan sebagai perangkat pengecualian. Kumpulan penyangga yang dirancang dengan baik dan efektif, bersama dengan langkah-langkah pemantauan, pelaporan, dan pemulihan yang tepat yang diadopsi peserta kegiatan adalah perangkat yang konsisten dan teruji untuk memperhitungkan dan mengompensasi pembalikan. *Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Catatan Teknis Conservation International: Memahami risiko pembalikan dalam penghapusan emisi berbasis alam](#).*
 - **Periode dan persyaratan pemantauan pasca-kredit:** Pemantauan pasca-kredit harus dapat dilaksanakan dan realistis untuk memberi insentif bagi kegiatan pemindahan agar terjadi, serta konsisten di seluruh jenis proyek, termasuk alternatif seperti menetapkan dan mengalihkan kewajiban pemantauan kepada Pihak Tuan Rumah.
 - **Pengamanan/safeguard:** Pengamanan harus selaras dengan dan dibangun berdasarkan standar dan kerangka kerja internasional yang ada, termasuk Cancun *Safeguard*. Kerangka kerja ketat untuk memastikan integritas lingkungan dan pembagian manfaat yang adil dengan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan risiko sosial dan lingkungan diidentifikasi dan dikurangi dengan benar, dampak sosial dan lingkungan yang positif digalakkan, dan hak serta partisipasi masyarakat adat dan masyarakat lokal dihormati dan ditingkatkan.

- **Para Pihak memastikan program kerja mengenai penghindaran emisi berdasarkan Pasal 6.2 dan Pasal 6.4 dan mengenai peningkatan konservasi berdasarkan Pasal 6.4 dibatasi pada cakupan mandat mereka.** Dua program kerja terkait “penghindaran emisi” dan satu program kerja terkait “peningkatan konservasi” ditetapkan pada COP 26 dan kerja lebih lanjut telah dilakukan menjelang COP 29. Istilah-istilah ini belum didefinisikan secara resmi oleh UNFCCC atau IPCC dan menimbulkan kebingungan di antara Para Pihak karena keduanya memiliki interpretasi berbeda. Pada SB 60, Para Pihak menyimpulkan negosiasi mengenai kedua topik ini akan ditunda hingga 2028. Terlepas dari diskusi ini, **semua penghapusan dan pengurangan emisi dari semua sektor (termasuk alam) sudah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 6, sepanjang persyaratan dalam panduan Pasal 6.2 dan Pasal 6.4 terpenuhi.** Karena itu, semua kegiatan harus diperlakukan sebagai penghapusan atau pengurangan emisi, dan tidak ada tempat membahas kegiatan baru atau jenis mitigasi yang belum ditetapkan. **Kedua program kerja ini harus tetap dibatasi cakupannya, memastikan tidak membahas kegiatan yang mengurangi emisi atau meningkatkan penghapusan, atau membuka kembali keputusan masa lalu.**
- **Membatasi perubahan pada otorisasi dan pencabutan otorisasi berdasarkan Pasal 6.2 dan Pasal 6.4.** Perubahan otorisasi harus dibatasi cakupannya dan hanya dilakukan sebelum transfer pertama. Dalam hal apa pun perubahan tidak boleh memungkinkan pencabutan sepihak dari satu Pihak, karena hal ini akan menciptakan ketidakpastian, menghambat keandalan transaksi Pasal 6.2 dan 6.4, dan memberikan sinyal negatif kepada pasar.
- **Berdasarkan program kerja Pasal 6.8 mengenai kerangka kerja pendekatan nonpasar, Para Pihak harus terus berupaya memberikan jalur jelas bagi kerja sama nonpasar melalui pendekatan mitigasi dan adaptasi berbasis alam.** Kelompok dan lokakarya *spin-off* harus memberikan visibilitas lebih besar terhadap inisiatif yang dipimpin masyarakat adat dan masyarakat, contoh NMA yang memperkuat hubungan keanekaragaman hayati iklim, kesiapan REDD+, pendekatan menghasilkan kondisi yang memungkinkan dan membuka pendanaan iklim jangka panjang, perjanjian konservasi dan pendekatan bentang alam/pemandangan laut terpadu, antara lain, serta berkontribusi pada peningkatan inisiatif ini. *Untuk informasi lebih lanjut lihat [Pengajuan Conservation International pada Pasal 6.8](#)*
- Para pihak dan aktor non-negara harus secara proaktif melibatkan masyarakat adat dan perwakilan masyarakat lokal dalam diskusi mengenai hubungan antara operasionalisasi Pasal 6 dan kerja Platform Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat, termasuk inklusi yang adil bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam mekanisme pembagian manfaat yang dihasilkan dari implementasi Pasal 6, memajukan hak penguasaan tanah, dan mengidentifikasi kriteria yang relevan untuk mendefinisikan, memantau dan melaporkan pendekatan non-pasar berdasarkan Pasal 6.8 yang mencakup NbS yang dipimpin masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Seiring dengan semakin beroperasinya mekanisme kerja sama berdasarkan Pasal 6 dan negara-negara mulai menggunakannya, semakin besar kebutuhan mempercepat dukungan finansial dan teknis bagi negara-negara berkembang untuk membangun kapasitas, kesiapan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan implementasi efektif. Para pihak harus mempertimbangkan cara memberikan dukungan ini untuk memastikan partisipasi adil dalam mekanisme kerja sama Pasal 6, serta memberikan peluang meningkatkan ambisi selama implementasi Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC).

Tujuan Kuantifikasi Kolektif Baru tentang Pendanaan Iklim

Agenda CMA butir 11a

Tautan Dokumen PBB yang Relevan: [Catatan ringkasan pada Dialog Pakar Teknis ke-10: Informasi tentang kemajuan pada pertemuan ke-2 di bawah program kerja Ad Hoc dan langkah ke depannya: Dokumen masukan terbaru untuk pertemuan ke-3 di bawah program kerja Ad Hoc](#)

Pada 2010, negara-negara maju berkomitmen memobilisasi dana \$100 miliar USD per tahun pada 2020 untuk mendanai aksi iklim di negara-negara berkembang. Dana ini akhirnya tercapai pada 2023. Namun, diskusi seputar pendanaan iklim berkembang, karena banyak yang menyadari tujuan awal ini tidak cukup, dengan

sedikitnya \$6 triliun USD yang dibutuhkan negara-negara berkembang untuk memenuhi hanya setengah dari target NDC mereka pada 2030.³ Dengan demikian, negara-negara sepakat menetapkan Sasaran Kuantifikasi Kolektif Baru (NCQG) terkait keuangan iklim pada COP 29. Melalui program kerja ad hoc NCQG dan Dialog Pakar Teknis, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya telah membahas perincian sasaran baru tersebut, termasuk kuantitas, kualitas, cakupan, akses, sumber, dan pengaturan transparansi, antara lain, termasuk struktur negosiasi politik untuk hasil COP 29.

Perjanjian ambisius mengenai NCQG sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pendanaan alam yang signifikan dan meningkatkan akses ke keuangan berkualitas tinggi bagi masyarakat yang mengelola alam dan menerapkan solusi berbasis alam untuk mengatasi perubahan iklim. Menurut UNEP: “Aliran keuangan tahunan ke NbS perlu meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2025 (dari US\$200 miliar menjadi US\$436 miliar) dan hampir tiga kali lipat menjadi US\$542 miliar pada tahun 2030 untuk mencapai target iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan.”⁴ Namun saat ini, NbS sangat kekurangan dana dibanding potensinya berkontribusi pada sepertiga kebutuhan mitigasi global: sektor pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU) hanya menerima 3% dari pendanaan mitigasi dan mitigasi/adaptasi ganda dan 11% dari pendanaan adaptasi pada 2021 – 2022.⁵ Aksi iklim di sektor AFOLU tidak hanya kekurangan dana, tetapi sebagian besar pendanaan untuk sektor ini saat ini bertentangan dengan tujuan iklim dan keanekaragaman hayati: Setiap tahun, \$7 triliun dihabiskan untuk aktivitas yang merusak alam, yang 35 kali lebih banyak dari \$200 miliar yang dialokasikan untuk NbS.⁶

Terlebih lagi, sebagian besar pendanaan yang mengalir ke sektor AFOLU – dan aksi iklim secara keseluruhan – tidak berkualitas tinggi. Target \$100 miliar dolar baru tercapai dalam dua tahun terakhir⁷, yang tidak memadai mengingat kecepatan dekarbonisasi yang harus dilakukan: sektor AFOLU harus mencapai nol emisi bersih pada 2030⁸ Komitmen perlu diterapkan secara luas dalam dua tahun ke depan untuk memastikan kemajuan menuju target 2030. Lebih dari itu, mengarahkan pendanaan kepada orang-orang yang mengelola lahan sangat penting untuk meningkatkan NbS; namun kurang dari 10% pendanaan iklim mencapai tingkat lokal antara 2003 dan 2016.⁹ Sementara masyarakat Adat mengelola separuh lahan dunia dan melindungi 80% keanekaragaman hayati global, mereka hanya menerima kurang dari 1% pendanaan iklim internasional selama dekade terakhir.¹⁰ Terakhir, dari 2016 hingga 2022, pendanaan iklim publik negara-negara maju yang diberikan secara bilateral dan melalui saluran multilateral sebagian besar berbentuk pinjaman, dengan proporsinya tumbuh setiap tahun, mencapai 69% pada tahun 2022.¹¹ **NCQG harus memberikan pendanaan lebih terprediksi dengan kecepatan lebih tinggi, sekaligus mengurangi tekanan utang, menjangkau komunitas lini depan secara langsung, memaksimalkan efektivitas, dan menghormati tindakan pengaman (*safeguards*).**

Dalam hasil COP 29, **Para Pihak harus memastikan memasukkan kebutuhan pendanaan iklim untuk alam, termasuk untuk habitat pesisir.** Conservation International mendesak Para Pihak mempertimbangkan rekomendasi berikut ini:

- Jika memungkinkan, menyelaraskan elemen-elemen NCQG dengan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming–Montreal (khususnya Tujuan D dan Target 18 dan 19) **untuk menangkap sinergi bagi aksi iklim-keanekaragaman hayati, serta menyederhanakan proses implementasi dan pelaporan untuk memastikan tidak ada penghitungan ganda antara keduanya.** Pendanaan di bawah NCQG harus bersifat tambahan, mendukung upaya iklim dan keanekaragaman hayati tanpa tumpang tindih dengan komitmen yang ada. Khususnya, 81% pembiayaan terkait keanekaragaman hayati juga menargetkan

³ UNCTAD: [A climate finance goal that works for developing countries](#)

⁴ UNEP: [State of Finance for Nature 2023](#)

⁵ Climate Policy Initiative: [Global Landscape of Climate Finance 2023](#)

⁶ UNEP: [State of Finance for Nature 2023](#)

⁷ OECD: [Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2022](#)

⁸ Conservation International. [Exponential Roadmap for Natural Climate Solutions](#)

⁹ IIED: [Delivering real change: getting international climate finance to the local level.](#)

¹⁰ UNEP: [State of Finance for Nature 2023](#)

¹¹ OECD: [Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2022, Climate Finance and the USD 100 Billion Goal 2024](#)

perubahan iklim, tetapi hanya 21% pembiayaan iklim yang secara khusus menargetkan keanekaragaman hayati.¹² Penyelarasan akan mendukung konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi iklim, dan upaya adaptasi secara bersamaan, membuat investasi keuangan lebih efisien dan berdampak.

- Mengadopsi pendekatan berlapis yang terdiri dari target kuantitatif untuk mobilisasi dan penyediaan pendanaan iklim dan penghapusan subsidi yang merugikan, dan elemen kualitatif untuk mobilisasi sumber daya domestik, memanfaatkan pendanaan swasta, dan mempromosikan penggunaan pendanaan campuran dan instrumen inovatif. Dalam pendekatan ini:
 - Menetapkan target tahunan yang ambisius untuk mobilisasi atau penyediaan pendanaan iklim dari semua sumber, dengan sub-tujuan untuk mitigasi, adaptasi, serta kerugian dan kerusakan. Jumlahnya harus didasarkan pada pengetahuan dan data terbaik yang tersedia tentang kebutuhan pendanaan iklim global, yang memastikan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan NbS dan adaptasi berbasis ekosistem (EbA) serta prioritas negara-negara berkembang.
 - Berdasarkan target tahunan untuk mobilisasi atau penyediaan pendanaan iklim, mempertimbangkan untuk menetapkan sub-tujuan yang terkait dengan setiap sumber pendanaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mobilisasi sumber daya domestik, pendanaan/ODA internasional, kontribusi sektor swasta dan filantropi, instrumen pendanaan inovatif, dan reformasi insentif/subsidi. Jumlahnya harus didasarkan pada jumlah yang saat ini dibelanjakan, jumlah yang dibutuhkan, dan keadaan nasional.
 - Berdasarkan tujuan mitigasi, pertimbangkan untuk menetapkan sub-tujuan indikatif yang terkait dengan setiap sektor dan/atau jalur mitigasi. Misalnya, negara-negara harus **bertujuan mengalokasikan 30% dari keuangan mereka untuk NbS, karena NbS harus memberikan kontribusi sebesar 30% dari potensi mitigasi untuk memenuhi tujuan 1,5C.**
 - **Mengembangkan target ambisius untuk menghapus subsidi dan/atau insentif merugikan yang mendorong kegiatan yang menghasilkan emisi tinggi dan pembangunan non-tanggung,** termasuk, antara lain, yang terkait bahan bakar fosil dan aktivitas berbahaya dalam sektor AFOLU yang menyebabkan kerusakan alam. Mempertimbangkan untuk menetapkan target berbasis waktu untuk identifikasi dan analisis subsidi paling berbahaya, serta kapan dan seberapa besar subsidi tersebut harus direformasi. Hal ini harus selaras dengan Target 18 GBF jika memungkinkan.¹³
- Mengembangkan **sub-tujuan kualitatif sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan NCCG,** yang harus dilaporkan bersama tujuan-tujuan lainnya. Tujuan-tujuan ini harus bercita-cita untuk:
 - Menetapkan **standar jelas untuk pembiayaan iklim baru dan tambahan berkualitas tinggi** demi kecepatan lebih tinggi, prediktabilitas jangka panjang, akses, responsivitas gender, serta perlindungan (*safeguards*).
 - Bertujuan meningkatkan dan memperluas mobilisasi **pendanaan iklim yang dapat diakses langsung masyarakat adat dan komunitas lokal, perempuan, dan kelompok rentan iklim lainnya.**
 - Menjamin **penyaluran dana berimbang di seluruh pilar dan sektor tematik,** memastikan penutupan kesenjangan pendanaan yang tidak proporsional untuk adaptasi, sektor AFOLU, dan NbS, antara lain.

¹² OECD: [Biodiversity and Development Finance, 2015-2021](#)

¹³ [Target 18 dari GBF](#): Mengidentifikasi pada tahun 2025, dan menghilangkan, menghapuskan atau mereformasi insentif, termasuk subsidi, yang merugikan keanekaragaman hayati, dengan cara yang proporsional, adil, wajar, efektif dan setara, sambil secara substansial dan progresif menguranginya paling sedikit 500 miliar dolar Amerika Serikat per tahun pada tahun 2030, dimulai dengan insentif yang paling merugikan, dan meningkatkan insentif positif untuk konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

- o **Memaksimalkan efektivitas biaya pendanaan iklim dan mendorong penyediaan pembiayaan untuk solusi iklim yang memiliki banyak manfaat iklim, sosial, dan ekologi**, termasuk NbS dan EbA.
- o Menjamin mobilisasi sumber daya melalui **instrumen keuangan yang tidak menambah beban utang atau mengurangi tekanan utang negara-negara berkembang**, termasuk hibah, investasi ekuitas, pertukaran utang dengan alam, pembayaran berbasis hasil, pembayaran berbasis nilai ekosistem, dan pembayaran berbasis kompensasi.
- o **Membangun kapasitas dalam negeri untuk menyalurkan pembiayaan secara efektif** untuk pelaksanaan proyek, termasuk dukungan untuk kesiapan dan pengembangan proyek.
- o **Mengatasi kesenjangan pengetahuan** termasuk kuantifikasi kebutuhan, prioritas, dan mobilisasi keuangan iklim berdasarkan sektor, subsektor, wilayah geografis, dan jangka waktu.
- **Menyelaraskan** kerangka waktu, pelaporan, dan siklus tinjauan tujuan dengan proses yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Paris jika memungkinkan, seperti, antara lain, kerangka waktu umum NDC, Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan, dan proses Global Stocktake. Mengintegrasikan NCQG dengan cara ini akan memungkinkan tujuan secara teratur mencerminkan informasi terkini, serta mengurangi beban pelaporan dan menghindari proliferasi proses untuk negara-negara yang menghadapi kendala kapasitas. Sistem tambahan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan untuk memastikan semua elemen NCQG dapat dipantau dengan baik.

Program Kerja UEA-Belem tentang Indikator Kerangka Kerja UEA tentang Ketangguhan Iklim Global

Agenda CMA butir 9a

Agenda SBSTA butir 5a

Agenda SBI butir 11a

Tautan Dokumen PBB yang Relevan: [SB 60 Kesimpulan tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Tujuan Global tentang Adaptasi](#); [Catatan tentang kompilasi dan pemetaan indikator](#); [Kompilasi indikator yang ada](#)

Kerangka Kerja UEA untuk Ketahanan Iklim Global yang diadopsi pada COP 28 memberikan arahan strategis melalui tujuh target tematik dan target empat dimensi yang menentukan bagaimana negara-negara akan mencapai tujuan adaptasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Program kerja UEA-Belem selama dua tahun mengenai indikator akan mengembangkan indikator dan metrik untuk mengukur dan menilai kemajuan menuju Kerangka Kerja UEA. Selama SB 60, negara-negara menyetujui jadwal, kegiatan, pedoman pemetaan indikator, dan proses lainnya, seperti keterlibatan pakar teknis dan lokakarya, tentang bagaimana program kerja akan mengembangkan hasil yang diharapkan untuk COP 30.

Program kerja harus mengarah pada serangkaian metrik, indikator, dan elemen terukur yang kuat untuk Kerangka Kerja yang dapat digunakan negara melaporkan pencapaian adaptasi dan memastikan penilaian kolektif atas kemajuan menuju targetnya. Singkatnya, “apa yang diukur akan dikelola,” dan prinsip ini akan sangat penting untuk memastikan negara-negara memprioritaskan ketahanan ekosistem dan mengadopsi pendekatan adaptasi berbasis ekosistem jika diperlukan. Demikian pula, penyertaan indikator yang terkait dengan keuangan dan implementasi dapat membantu menutup kesenjangan pendanaan adaptasi. Adaptasi lazimnya kekurangan dana, karena hanya menerima 10% dari pendanaan iklim global, yang mana adaptasi berbasis alam hanya mencakup seperlima dari total. Conservation International merekomendasikan hal-hal berikut pada COP 29 untuk menjadi dasar program kerja UEA-Belem:

- **Negosiasi mengenai isu-isu tersisa terkait modalitas dan prosedur program kerja UEA-Belem harus difokuskan pada penguatan hasil SB 60** untuk memastikan sejumlah besar pekerjaan teknis yang dibutuhkan dapat diselesaikan tepat waktu melalui proses yang inklusif dan partisipatif, yang harus membangun dan melengkapi badan-badan terkait adaptasi yang ada di bawah UNFCCC.

- **Solusi berbasis alam dan kerentanan ekosistem terhadap perubahan iklim harus dimasukkan dalam target tematik dan dimensional sebagai tema lintas sektor** yang mengakui alam sebagai solusi adaptasi penting dan aset yang rentan terhadap dampak iklim. Metrik dan indikator yang terkait dengan ekosistem dan pendekatan EbA perlu diidentifikasi jelas dalam target tematik 9d tetapi juga harus dihubungkan ke target tematik lain (9 ag) dan target dimensi terkait siklus adaptasi (10 ad).
- Indikator yang memiliki sinergi dengan Konvensi Rio PBB dan kerangka kerja internasional lainnya, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, harus diprioritaskan untuk mengurangi beban pengumpulan data dan memfasilitasi tindakan sinergis di seluruh hubungan iklim-keanekaragaman hayati-pembangunan. **Perhatian khusus harus diberikan untuk mengintegrasikan indikator terkait dari Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global untuk target ekosistem dan keanekaragaman hayati (9d).** Namun, banyak indikator yang ada tidak spesifik untuk adaptasi iklim dan risiko iklim dan harus disesuaikan jika memungkinkan untuk menangkap informasi yang relevan untuk Kerangka Kerja UEA.
- Indikator dan metrik harus **didasarkan pada penelitian ilmiah terbaik, pengetahuan masyarakat adat dan tradisional, serta pengalaman implementasi praktis**, dengan pemahaman beberapa tingkat ketidakpastian kemungkinan akan selalu ada, dan karenanya opsi *no-regret* harus diprioritaskan.
- **Indikator keuangan dan pendukung implementasi harus disertakan karena penting untuk mengukur pencapaian target tematik dan dimensional.** Indikator harus mencakup dimensi dukungan teknis, pengembangan kapasitas dan pengembangan rencana investasi yang tepat, misalnya, alat penghitungan biaya NAP dan estimasi kebutuhan finansial untuk melaksanakan ketahanan adaptasi.
- **Indikator harus mengakui pentingnya dan prinsip adaptasi berbasis masyarakat.** Memasukkan prinsip-prinsip berbasis masyarakat ke dalam indikator adaptasi melibatkan perencanaan pada skala tepat (misalnya, daerah tangkapan air, lanskap, bentang laut) dan lintas ekosistem yang saling terkait, keterlibatan yang bermakna dengan para pemangku kepentingan masyarakat, menghormati sistem pengetahuan adat dan tradisional, dan membina proses pengambilan keputusan kolaboratif untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga lokal untuk memimpin tindakan adaptasi berkelanjutan dan efektif di tingkat lokal.
- Berdasarkan **target 9d mengenai ekosistem dan keanekaragaman hayati, Para Pihak harus mempertimbangkan mengadopsi elemen terukur, seperti “melestarikan, memulihkan, dan mengelola alam secara efektif untuk ketahanan dan adaptasi iklim serta memulihkan, melestarikan, dan mengelola secara efektif setidaknya 30% ekosistem daratan, perairan pedalaman, pegunungan, laut, dan pesisir,** dengan perhatian khusus pada ekosistem yang sudah mengalami kerusakan atau diketahui berisiko tinggi akibat dampak perubahan iklim dan ekosistem penting untuk memberikan manfaat adaptasi bagi manusia dan alam.”
- **Elemen, indikator, dan metrik terukur apa pun untuk target 9g pada warisan budaya harus mencerminkan pengetahuan masyarakat adat dan tradisional yang terkait dengan pengamatan, risiko, dan strategi adaptasi lokal terhadap perubahan iklim yang telah membantu merancang, menerapkan, dan memantau adaptasi.** Hubungan kuat masyarakat adat dan komunitas lokal dengan alam memungkinkan mereka mendeteksi dan mengalami perubahan bernuansa pada lingkungan mereka dan menanggapi dengan inisiatif adaptasi otonom berdasarkan perubahan tersebut. Sasaran tersebut juga harus mencakup pelestarian praktik budaya dan sistem pengetahuan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang situs warisan budaya melalui penguatan atau revitalisasi pengetahuan dan praktik berdasarkan prioritas masyarakat adat dan tradisional.
- **Semua indikator dan metrik yang terkait dengan alam harus dipisahkan berdasarkan ekosistem,** seperti ekosistem daratan, perairan pedalaman, pegunungan, laut, dan pesisir. Indikator-indikator ini

harus mengukur kesehatan dan kerentanan ekosistem-ekosistem ini akibat perubahan iklim dan manfaat adaptasi yang diberikannya.

- **Semua indikator dan metrik yang terkait dengan orang dan populasi harus dipisahkan** berdasarkan jenis kelamin dan jika memungkinkan, variabel lain dan kelompok rentan berbeda. Ini dapat mencakup usia, kemampuan/disabilitas, status IPLC, dll. Disagregasi berfungsi sebagai alat penting dalam memahami apakah ketidakadilan yang ada berkurang, seperti kekerasan berbasis gender yang berasal dari tekanan iklim, atau jika kerugian yang tidak disengaja muncul dari penerapan tindakan tertentu.

[Lihat pengajuan Conservation International mengenai program kerja UEA-Belem untuk rekomendasi lengkap kami.](#)

Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat

Pertemuan ke-12 Kelompok Kerja Fasilitatif (FWG)

Tautan Dokumen PBB yang Relevan: [Kesimpulan SBSTA 60 di LCIPP: Catatan Ringkasan Keputusan dari Pertemuan ke-11 FWG](#)

Perjanjian Paris secara eksplisit mengakui hak-hak masyarakat adat (IP) dan masyarakat lokal (LC) dalam konteks aksi iklim. Melalui Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (LCIPP) dan Kelompok Kerja Fasilitatifnya, Para Pihak dan masyarakat adat bekerja untuk bertukar pengetahuan dan membangun kapasitas guna memperkuat partisipasi inklusif IP dan LC, serta mengakui kontribusi mereka dalam mengatasi perubahan iklim. LCIPP melaksanakan tiga fungsinya yang terkait dengan (i) pengetahuan, (ii) kapasitas keterlibatan, dan (iii) kebijakan dan tindakan perubahan iklim, melalui rencana kerja tiga tahun keduanya, yang menetapkan beberapa kegiatan hingga tahun 2024. [Acara yang diamanatkan LCIPP di COP29](#) meliputi Pertemuan Pemegang Pengetahuan, Diskusi Kelompok Pemuda, dan Dialog Multipihak. Selain berpartisipasi dalam kegiatan ini, **pemangku kepentingan pihak dan non-pihak harus mempunyai tujuan berikut pada COP 29:**

- **Mengadopsi rancangan keputusan COP mengenai LCIPP untuk melanjutkan mandat FWG, mengadopsi rencana kerja LCIPP 2025-2027**, dan memungkinkan upaya yang berkontribusi pada keterlibatan penuh dan bermakna dari IP dan LC di bawah konvensi dan Perjanjian Paris.
- Memastikan **operasionalisasi penuh fungsi LCIPP dan mempromosikan ruang bagi perwakilan FWG untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada item agenda negosiasi yang relevan**, termasuk program kerja Pasal 6.8, program kerja UEA-Belem tentang indikator, kerugian dan kerusakan, serta program kerja transisi yang adil UEA.
- **Menggabungkan rekomendasi dari laporan hasil FWG** dalam pelaksanaan rencana kerja LCIPP 2025–2027, dengan mempertimbangkan kemajuan terkait representasi masyarakat lokal dan mempertimbangkan cara-cara keterlibatan lebih lanjut.
- **Menyebarkan hasil dan pembelajaran dari pertukaran regional LCIPP dan menggunakannya untuk menginformasikan agenda utama UNFCCC** dan memperkuat hubungan lintas konvensi PBB, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati.
- **Menerapkan model kolaboratif FWG berdampingan dengan LCIPP** antara Pihak dan masyarakat Pribumi untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang-bidang yang partisipasi pemangku kepentingan non-Pihak sangat penting untuk meningkatkan ambisi iklim dan memenuhi tujuan Perjanjian Paris.
- **Meningkatkan keterlibatan pemerintah yang bermakna dalam kegiatan LCIPP**, terutama yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan iklim nasional. Para pihak harus berkolaborasi dengan masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk memperkuat hubungan antara tindakan iklim masyarakat adat dan pemerintah daerah di tingkat lokal-nasional dan regional-global.

Hubungan Laut dan Iklim

Tautan Dokumen PBB yang Relevan: [Laporan Ringkasan Informal Dialog Perubahan Iklim dan Kelautan 2024](#)

Hasil COP terkini menggambarkan pengakuan yang semakin besar terhadap peran penting solusi berbasis alam pesisir dan laut dalam aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang ambisius. Konsensus UEA mengisyaratkan pentingnya aksi adaptasi dan mitigasi berbasis laut, termasuk melestarikan dan memulihkan ekosistem pesisir dan laut, dan mendorong penguatan lebih lanjut aksi berbasis laut. Dialog Laut dan Perubahan Iklim Juni 2024 mencakup diskusi tentang ketahanan pesisir, teknologi kelautan yang sedang berkembang dan cara mendanainya, dan menyerukan perlunya memperkuat hubungan keanekaragaman hayati-iklim di seluruh kebijakan nasional, UNFCCC, dan target GBF. Masih banyak peluang untuk memajukan pekerjaan ini. Karena itu, pada COP 29, Conservation International mendorong Para Pihak untuk:

- **Meningkatkan pendanaan iklim dan memobilisasi peningkatan aliran keuangan untuk solusi berbasis alam pesisir dan laut.** Dalam negosiasi yang sedang berlangsung terkait keuangan, termasuk Tujuan Kuantifikasi Kolektif Baru tentang Keuangan Iklim, Komite Tetap Keuangan, dan Dana Kerugian & Kerusakan, negara-negara harus memastikan proses dan struktur yang sedang dibangun memungkinkan dan mendukung pembiayaan yang kuat untuk NbS pesisir dan laut.
- **Menggabungkan indikator untuk solusi berbasis alam pesisir dalam Kerangka Kerja UEA untuk Ketahanan Iklim Global.** Para pihak harus menyerukan penyertaan eksplisit NbS pesisir dan laut sebagai elemen lintas sektor dari target tematik dan dimensional Kerangka Kerja UEA untuk meningkatkan ketahanan pesisir dan meningkatkan mata pencaharian. Misalnya, indikator potensial seperti, “kerusakan infrastruktur dan permukiman manusia yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim (% pengurangan dibandingkan dengan *baseline*)” dapat diukur dengan indikator yang berpusat pada NbS pesisir (misalnya, kerugian yang dapat dihindari).
- **Meningkatkan dan menyelaraskan ambisi untuk NbS pesisir dalam perencanaan iklim nasional.** Para Pihak dapat menggunakan dialog dan acara COP 29 untuk membangun kapasitas dan pemahaman tentang cara-cara NbS pesisir, termasuk konservasi dan pemulihan habitat karbon biru, dapat dimasukkan dalam NDC dan Rencana Adaptasi Nasional yang baru dan yang diperbarui. Mereka harus bertujuan untuk menggabungkan temuan dari laporan ringkasan informal dari topik ketahanan pesisir Dialog Perubahan Iklim dan Kelautan Juni 2024. Lebih jauh, Para Pihak harus meningkatkan hubungan keanekaragaman hayati-iklim untuk habitat pesisir dan laut dengan menyelaraskan target dalam pembaruan NDC dengan Strategi Keanekaragaman Hayati Nasional dan Rencana Aksi di bawah GBF. Menciptakan tujuan yang kohesif untuk NbS pesisir di seluruh komitmen nasional membantu memastikan bahwa konservasi dan pemulihan habitat karbon biru mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak iklim. Sumber daya tambahan untuk mendukung pembaruan NDC negara-negara meliputi [Karbon Biru dan Kontribusi Nasional yang Ditetapkan: Edisi Kedua](#) dan [Panduan untuk Menyertakan Infrastruktur Hijau-Abu-abu Pesisir dalam NDC](#).